

Jokowi: Investasi di Indonesia Terhambat Urusan Perizinan

Rabu, 24 Januari 2018 | 7:17

<http://sp.beritasatu.com/home/jokowi-investasi-di-indonesia-terhambat-urusan-perizinan/122437>



Presiden Jokowi dalam kunjungan di Cirebon [Istimewa]

Berita Terkait

- [Presiden Serahkan 3.500 Sertifikat untuk Warga Lampung](#)
- [Jokowi: Dukungan RI Atas Palestina Tidak Akan Surut](#)

[JAKARTA] Investasi masih terhambat pada urusan-urusan perizinan. Padahal, ribuan investor ingin masuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Rapat Kerja Pemerintah "Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah" di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/1). Rapat tersebut dihadiri gubernur dan pimpinan DPRD seluruh Indonesia.

Presiden berharap ada panduan yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) menyelesaikan persoalan perizinan. Sistem perizinan terintegrasi atau single submission akan dibangun. "Didahului dengan pembentukan satgas (satuan tugas) terutama nanti di pusat, biar sambung dengan daerah-daerah tujuan investasi, sehingga kita semuanya satu bahasa menyelesaikan masalah," kata Presiden.

Presiden memberikan contoh pengurusan izin di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Saat ini, ada sembilan izin yang rampung hanya dalam waktu tiga jam. Padahal, pada waktu lalu izin tersebut baru terbit berbulan-bulan hingga tahunan. "Sembilan izin dalam waktu tiga jam, bisa kita lakukan. Niat atau enggak niat, mau atau enggak mau, urusannya itu saja," ujar Presiden.

Presiden mengakui perizinan tidak hanya menjadi ranah BKPM. Masih ada izin-izin tertentu yang mesti diurus di tingkat kementerian hingga pemda. Diungkapkan, investasi sejumlah negara seperti India, Filipina dan Malaysia mengalami peningkatan pada 2017.

Investasi di India naik 30 persen, Filipina 38 persen serta Malaysia 51 persen. Sedangkan Indonesia hanya meningkat 10 persen. "Ada apa kok mereka berbondong-bondong ke sana, tidak ke kita. Alasan nomor satu kita kalah bersaing. Kita ini kebanyakan aturan-aturan, persyaratan-persyaratan, kebanyakan perizinan-perizinan yang masih berbelit. Sampai detik ini masih," ungkap Presiden.

Kualitas

Presiden meminta para gubernur dan pimpinan DPRD agar tidak membuat regulasi berupa peraturan daerah (perda) yang begitu banyak. Sebab, hal itu hanya akan menambah keruwetan. Presiden juga mengingatkan jajaran menteri Kabinet Kerja untuk melakukan hal yang sama. Dijelaskan, para menteri tidak perlu mengajukan banyak undang-undang (UU) ke DPR.

"Undang-undang yang lama juga kita akan cek satu persatu, kita revisi, perbaiki yang kurang. Perda juga sama tolong dilihat, terutama perda yang berkaitan percepatan berusaha. Kalau memang itu enggak mempercepat atau justru memperlambat, kalau bisa dihilangkan atau enggak direvisi," tegas Presiden.

Hal terpenting, menurut Presiden, kualitas dari regulasi bukan kuantitas. "Kalau sudah mengeluarkan perda banyak itu sebuah prestasi? Menurut saya tidak. Bagaimana kualitas setiap UU, setiap Perda itu justru mempercepat justru meringankan masyarakat," ucap Presiden.

Presiden menekankan bahwa harmonisasi kebijakan menjadi keniscayaan. Ditegaskan Presiden, penerapan otonomi daerah (otda) berbeda dengan negara federal. Indonesia, menurut Presiden, merupakan negara kesatuan. "Kita harus mengharmonisasi kembali kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemda. Hubungan antara pusat provinsi, kabupaten dan kota ini masih satu garis," tegasnya.

Presiden menyatakan, apabila masing-masing pemda menerbitkan peraturan dan standar sendiri tanpa koordinasi, maka yang terjadi ialah fragmentasi. "Kita bukan sebuah pasar besar lagi, pasar nasional, pasar tunggal yang besar, tetapi terpecah menjadi pasar kecil sebanyak 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Itu bukan menjadi sebuah kekuatan kita," tandasnya.

Presiden mengungkapkan, investor merasa kesulitan dalam mengurus perizinan. Dari sisi regulasi, izin di pusat ternyata berlanjut ke daerah. "Itu seperti masuk ke wilayah yang lain. Kenapa enggak bisa segaris? Mestinya kan sama. Ini kan kita bingkai NKRI. Kok

mendadak kayak masuk ke negara lain. Ini bahaya kalau persepsi itu muncul," ungkap Presiden.

Seusai pertemuan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan, Presiden menekankan pembentukan satgas khusus di setiap wilayah. "Dari seluruh Indonesia batas waktu pembentukan satgas akhir Januari, karena itu dilakukan pertemuan ini untuk mengingatkan karena dari 34 provinsi hanya sepuluh yang sudah. Dari 514 kabupaten/kota hanya 75 yang sudah ada satgasnya," kata Anies.

Menurutnya, fungsi satgas yaitu menyelaraskan penyelesaian masalah perizinan untuk meningkatkan investasi. "Kalau di Jakarta lebih leluasa ya karena kan kita di sini (ibu kota). Di daerah masalahnya, tadi ditunjukkan banyak masalah di daerah. Kalau di Jakarta sudah jadi satu," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menyatakan, pejabat atau birokrasi di daerah memang tak mudah mempercepat perizinan usaha. Hal itu disebabkan adanya kekhawatiran pelanggaran hukum. "Kalau nanti dikeluarkan lebih cepat dan malah melanggar, misalnya aturan kehutanan, aturan mengenai dampak lingkungan, aturan lain, bisa yang ditangkap pejabatnya," kata Syahrul.

Meski begitu, dia mendukung langkah pemerintah pusat menerapkan sistem perizinan terintegrasi. "Harus ada kesamaan visi dalam mencoba mempercepat, karena regulasi kita aturannya per sektoral terlalu tinggi sehingga walau gubernur mau cepat, tapi kementerian lambat, maka juga tidak akan sama," tukasnya. [C-6]